

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

# PSI Laporkan KPK, Kontraktor Layangkan Somasi

## Gambir, Warta Kota

DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta melaporkan PT Bahana Prima Nusantara selaku kontraktor proyek revitalisasi Monumen Nasional (Monas) senilai Rp 64,4 miliar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (23/1). Kontraktor itu dilaporkan karena diduga asal usul perusahaannya tidak jelas.

Anggota Advokasi PSI DKI Jakarta Patriot Muslim mengatakan, persoalan alamat kantor perusahaan tersebut masih simpang siur. Sebab pihaknya saat mendatangi kedua kantornya di Jakarta,

cenderung tidak merepresentasikan sebagai perusahaan yang memegang proyek besar.

Seperti penelusuran yang dilakukan Tim Advokasi PSI beberapa waktu lalu di kantor PT Bahana Prima Nusantara. Saat itu PSI mendatangi kantor pelaksana proyek itu di Jalan Nusa Indah Nomor 33, Ciracas, Jakarta Timur berdasarkan website lps.jakarta.go.id.

"Tim Advokasi PSI telah menelusuri alamat tersebut yang ternyata berlokasi di sebuah gang di kawasan permukiman," kata Patriot berdasarkan keterangan yang diterima pada Kamis (23/1).

## Stigma

Sebaliknya, PT Bahana Prima Nusantara (BPN) selaku kontraktor proyek revitalisasi Monas bakal melayangkan somasi kepada anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Justin Adrian Untayana. Somasi dilayangkan atas dugaan pencemaran nama baik soal keberadaan kantor BPN yang dianggap kurang meyakinkan.

"Kira-kira dalam waktu tiga sampai lima hari akan kami kirimkan somasi kepada yang bersangkutan," ujar pengacara PT Bahana Prima Nusantara, Abu Bakar kepada wartawan di Penang

Bistro Jakarta Pusat pada Kamis (23/1).

Menurut dia, cuitan Justin di akun media sosial Twitter pada Rabu (22/1) lalu dianggap merugikan kliennya. Saat itu Justin menilai janggal dengan alamat kantor perusahaan kontraktor tersebut karena berdasarkan Google Map kurang meyakinkan.

Pernyataan Justin dianggap menimbulkan stigma di masyarakat bahwa keberadaan perusahaan tersebut abal-abal alias palsu. Padahal perusahaan itu terdata dan memiliki izin yang disahkan Kemenkumham sejak 1993. (faf)